

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah cermin yang paling utama dengan memiliki kesuksesan yang tidaknya pemerintah mengenai suatu bangsa. Desa merupakan ujung tombak yang terselenggarakan pemerintah di suatu negara. Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan berlandaskan pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Desa merupakan kepala desa ataupun dapat disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dengan hal tersebut yang memiliki kewenangan yakni pemerintah desa, yang merupakan suatu unsur penyelenggara pemerintahan desa (Andika et al., 2021).

Seorang kepala desa mempunyai tanggungjawab sebagai pemimpin untuk menjalankan kewajiban dalam bekerja sebagai pelayanan masyarakat sekaligus dapat menjalankan program pembangunan di desa. Dalam setiap perencanaan pembangunan desa yang telah diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa yang melalui Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam melakukan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang menetapkan prioritas, kebutuhan pembangunan desa maupun menetapkan segala prioritas dan program kegiatan yang telah didanao oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang berlandaskan penilaian terhadap suatu kebutuhan dan swadaya masyarakat desa.

Setiap adanya pembangunan desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa dengan semangat julukan gotong royong serta dapat memanfaatkan kearifan lokal maupun sumber daya alam desa. Dalam pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa melalui informasi dari kepada pemerintah desa yang dapat diintegrasikan dengan adanya rencana pembangunan desa. Sebagai masyarakat desa memiliki hak tentang mendapatkan informasi dan dapat melakukan pemantauan mengenai rencana maupun pelaksanaan dalam setiap pembangunan desa (Andika et al., 2021).

Pembangunan desa bagian dari pembangunan masyarakat yang dapat diarahkan kepada pembangunan kelembagaan dan memiliki partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan pada suatu wilayah pedesaan. Beberapa permasalahan pokok yang berkaitan dengan adanya pembangunan desa yang dapat dilihat dari sumber manusianya, ekonomi dan sosial daerah desa (Endah, 2015).

Kesuksesan ataupun kegagalan pada suatu organisasi yang dapat dijelaskan banyak hal, contohnya adalah kepemimpinan yang dapat berjalan dalam organisasi tersebut. Pemimpin yang sukses merupakan pemimpin yang mampu dapat menjadikan penggerak maupun pencipta untuk bawahannya dengan menciptakan suasana kerja yang dapat memacu perkembangan maupun pertumbuhannya dengan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fathoni et al., 2018).

Menurut Sumaryadi dalam jurnal (Sahriyati & Nanang, 2023) menjelaskan mengenai partisipasi yakni keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan dalam pembangunan baik dengan bentuk kegiatan ataupun pernyataan dengan memberikan sumbangan pikiran, tenaga, modal, materi maupun waktu yang ikut serta dalam menikmati dan menggunakan fasilitas setelah melakukan pembangunan. Dalam setiap melakukan pembangunan desa selalu adanya partisipasi dari masyarakat baik itu partisipasi tenaga, pemikiran, sosial maupun harta benda yang sangat dibutuhkan. Karena dapat meningkatkan masyarakat untuk mengetahui adanya suatu permasalahan yang ada contohnya seperti sarana prasana, pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam yang ada, pengembangan potensi ekonomi lokal sehingga dapat memudahkan untuk melakukan proses dalam melakukan pembangunan.

Dengan adanya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa baik infrastruktur seperti jalan, stadion, bendungan, jembatan, jaringan listrik dan terminal. Pembangunan tersebut sangat diperlukan karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat setempat merupakan bagian dari suatu proses dalam pembangunan di desa yang akan lebih mudah terlaksana. Selain itu juga, masyarakat akan lebih mempercayai dengan adanya suatu program pembangunan jika masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam mengetahui pembangunan serta memiliki rasa ingin tahu terhadap program tersebut. Dalam partisipasi masyarakat bukan hanya terlibat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, akan tetapi masyarakat juga ingin terlibat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat (Sahriyati & Nanang, 2023).

Sumber daya manusia merupakan kebutuhan yang utama untuk dapat menjalankan segala kegiatan yang ada di dalam organisasi pemerintahan. Desa sebagai bagian terkecil dari struktural pemerintahan di Indonesia memiliki kewenangan dalam merencanakan pembangunan dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia sebagai ujung tombak berjalannya suatu desa ditentukan oleh Kepala Desa. Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa itu sendiri. Peran pemimpin sangatlah penting untuk melindungi kinerja Pemerintahan yang dikelolanya. Setiap pelaksanaan kegiatan, faktor yang paling menentukan adalah sikap profesional aparatur Pemerintah khususnya pimpinan instansi Pemerintah daerah.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala desa dibantu dengan perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan contohnya seperti Kepala Urusan dan Unsur Kewilayahan, seperti kepala dusun, sekertaris desa yang dimaksud yakni Sekretaris Desa yang ada selama ini adalah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala desa adalah suatu seni dan ilmu untuk mempengaruhi orang lain ataupun orang-orang yang dipimpin sehingga dapat menimbulkan keinginan, kepatuhan, rasa hormat maupun memiliki kepercayaan terhadap seorang pemimpin dengan melaksanakan yang akan dikehendaki oleh pemimpin adalah tugas dan tujuan organisasi secara efektif maupun efisien (Lagantondo, 2018).

Pimpinan harus mementingkan tanggung jawab kepada Pemerintah, dalam hal ini dapat diartikan sebagai perilaku dan sikap, yakni seseorang menginspirasi orang lain untuk bekerja keras mencapai tujuan tertentu (Simanjuntak, 2012). Pemimpin adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Kartono dalam jurnal (Togatorop et al., 2021) menjelaskan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kelebihan maupun kecakapan khususnya dalam satu bidang, sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan demi pencapaian satu ataupun beberapa tujuan lainnya.

Kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa, dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan perekonomian masyarakat desa sekitar. Disisi lain, kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan juga berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, desa dalam hal ini adalah organisasi sangat dipengaruhi oleh pemimpin. Menurut Hasibuan dalam jurnal (Lusigita, 2017) mengatakan kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Kepemimpinan berkaitan erat dengan penggerakan (*actuating*). Fungsi pergerakan meliputi motivasi, kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, dan bentuk aktivitas pengaruh pribadi lainnya. Fungsi ini juga dianggap sebagai tindakan

secara proaktif mengambil tindakan dan membimbing pekerjaan yang perlu dilakukan dalam organisasi. Menurut Winardi dalam buku (Mesiono & Azis, 2020) menjelaskan fungsi manajemen lainnya yaitu : perencanaan, pengorganisasian, dan menggerakkan, mengawasi.

Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan hingga dewasa ini. Media masa, baik elektronik maupun cetak, seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas seputar kepemimpinan. Peran kepemimpinan yang sangat strategis dan penting bagi pencapaian misi, visi dan tujuan, merupakan salah satu motif yang mendorong manusia untuk selalu menyelidiki seluk beluk yang berkaitan dengan kepemimpinan.

Kepemimpinan kepala desa memiliki aspek-aspek kepribadian gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan seluruh masyarakatnya. Gaya kepemimpinan kepala desa erat hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh suatu pemerintahan desa. Model gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin dapat meningkatkan kinerja karyawannya dengan menyesuaikan tingkat kemampuan dalam setiap tugas bawahannya. Selain itu gaya kepemimpinan yang baik berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam kemajuan di desa.

Dikaitkan dengan beberapa gaya kepemimpinan, dapat dikatakan bahwa seorang birokrat ataupun kepala daerah biasanya terpengaruh dengan system dan pola. Pola yang sudah ada tersebut dipengaruhi oleh latar belakang profesi seorang

kepala daerah sebelumnya, fenomena yang terjadi pada kepemimpinan kepala daerah pada era otonomi daerah saat ini, juga diisi oleh orang-orang dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Pada saat ini muncul kepala daerah dengan latar belakang Militer ataupun Sipil (pengusaha, akademisi, birokrat). Gaya kepemimpinan para kepala daerah tidak hanya dipengaruhi latar belakang profesi mereka tetapi dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat, baik budaya maupun kebiasaan yang ada, perkembangan politik yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang Kepala Daerah, biasanya juga disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dibutuhkan di daerahnya. Kehidupan sosial masyarakat yang nantinya akan merasakan bagaimana hasil dan dampak dari kebijakan yang dibuat oleh kepemimpinan seorang Kepala Daerah. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang Kepala Daerah belum tentu selalu memiliki gaya kepemimpinan, tergantung situasi dan kondisi di lingkungan.

Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam kemajuan atau kemunduran suatu daerah demikian juga kemajuan suatu daerah atau kemunduran suatu daerah, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin. Begitu pentingnya peran seorang pemimpin sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian bagi peneliti. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap pemimpin berkewajiban memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membina, menggerakkan, mengarahkan semua potensi bawahannya agar terwujud pembangunan yang terarah juga bermanfaat dalam jangka panjang untuk masyarakat. Pimpinan perlu melakukan

pembinaan yang sungguh-sungguh terhadap bawahan agar dapat menimbulkan kepuasan dan komitmen sehingga pada akhirnya meningkatkan kinerja yang tinggi.

Pemerintah pada saat ini mendukung perkembangan dan kemajuan di setiap desa untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki pada setiap wilayah. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa. Menurut Sintia dalam jurnal (Aini & Suharyani, 2021) Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pada konsepsi ini bahwa pembangunan nasional menitik beratkan pada komponen yang ada pada suatu negara tersebut. Komponen bangsa harus saling bersinergi dan saling mengisi untuk tercapainya suatu tujuan pembangunan nasional tersebut. Tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang pedoman Pembangunan Desa, pembangunan desa bagian dari model partisipatif yakni suatu sistem pengelolaan pembangunan yang

dilakukan secara bersama-sama masyarakat melalui musyawarah, gotongroyong dan mufakat untuk mensejahterakan rakyat dan juga merupakan cara hidup masyarakat yang telah menjunjung nilai budaya di wilayah Indonesia (Rismayana, 2021).

Perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah mencakup beberapa tahapan yang ada di dalamnya. Proses perencanaan pembangunan ini mencakup penyelenggaraan perencanaan makro, semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahapan selanjutnya Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan yang paling terkecil dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah pembangunan yang berasal dari suatu desa. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Upaya dari peningkatan kualitas sumberdaya pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan, yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Pada pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan. Pembangunan desa memiliki tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pemerintah sangat memperhatikan pembangunan di pedesaan, karena desa merupakan tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia dan menjadi representasi kecil dari negara itu sendiri. Pembangunan desa dapat dilakukan baik

secara fisik maupun non-fisik. Pembangunan fisik meliputi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, termasuk bidang olahraga. Sarana dan prasarana olahraga di desa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong gaya hidup sehat. Desa juga memiliki potensi untuk mengembangkan olahraga melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Inisiatif ini memberikan peluang dalam pembangunan olahraga di desa.

Desa Cisayong telah berhasil mengoptimalkan pembangunan fisik di bidang olahraga dengan membangun lapangan sepakbola yang memenuhi standar internasional, setara dengan Gelora Bung Karno dan Gelora Bandung Lautan Api. Lapangan sepakbola ini memiliki ukuran 93x54 meter persegi dan menggunakan rumput *Zoysia matrella* yang kokoh, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIFA. Pembangunan lapangan tersebut didanai menggunakan Dana Desa 2018 dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Jawa Barat sebesar 1,4 miliar. Prestasi ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga, DR. (H.C.) Imam Nahrawi, S.Ag., M.KP., dan Gubernur Jawa Barat, Dr. (H.C.) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T, M.U.D. Selain sebagai prestasi yang diapresiasi, lapangan sepakbola tersebut juga berperan sebagai penggerak roda perekonomian di Desa Cisayong, memberikan kesejahteraan bagi penduduk setempat.

Hasil uraian diatas memicu peneliti tertarik meneliti keterkaitan keberhasilan pembangunan fisik desa salah satunya di bidang olahraga dengan pola gaya kepemimpinan yang dimiliki kepala desa dalam menggerakkan dan melaksanakan

pembangunan tersebut. Banyaknya kepemimpinan kepala daerah khususnya kepala desa, penulis menemukan figur kesuksesan dari seorang Kepala Desa yakni Yudi Cahyudin, S.AP, yang merupakan kepala desa terpilih masa jabatan 2013-2019 hingga sekarang periode kedua 2019-2025 berstatus dari keluarga kalangan pengusaha dalam membangun Desanya yang semula dari desa terbelakang menjadi desa yang maju, oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana jalannya beliau dalam menjalankan roda kepemimpinannya sebagai Kepala Desa yang sukses dalam membangun Desa di Desa Cisayong Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan uraian tersebut, tampaknya ada tantangan yang signifikan dalam pembangunan fisik dalam bidang olahraga di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya terkait dengan kekurangan lapangan sepakbola dan sarana olahraga yang memadai. Hal ini memunculkan kebutuhan yang mendesak untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap pembangunan fisik dalam bidang olahraga di Desa Cisayong.

Penelitian ini akan membantu memahami bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dapat mempengaruhi upaya pembangunan fisik dalam bidang olahraga di Desa Cisayong, yang dapat menjadi contoh atau acuan untuk pengembangan di daerah lain. Melalui penelitian ini, dapat diketahui bagaimana kepala desa dapat memobilisasi sumber daya dan mempengaruhi proses pengambilan dalam keputusan yang diambil untuk mengatasi tantangan pembangunan fisik olahraga yang dihadapi.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan yang penting dan relevan dalam memahami pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap pembangunan fisik dalam bidang olahraga di Desa Cisayong, serta memberikan rekomendasi dan rencana aksi untuk meningkatkan fasilitas olahraga secara keseluruhan di Kabupaten Tasikmalaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam mempengaruhi progres dan memajukan pembangunan fisik dalam bidang olahraga di desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui lebih dalam terhadap gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan fisik di bidang olahraga di daerah Desa Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diantaranya:

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang penting dalam menyediakan acuan dan data mengenai hubungan antara gaya kepemimpinan kepala desa dengan tingkat pembangunan desa dalam bidang olahraga. Hasil penelitian dapat menjadi referensi yang berharga dalam menyusun program pembangunan desa dalam bidang olahraga, sehingga dapat

membantu mencapai kemajuan desa yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi alat evaluasi bagi kepala desa dalam melihat dampak dari gaya kepemimpinannya terhadap pembangunan desa dalam bidang olahraga. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam pemahaman dan pengembangan dalam setiap melakukan pembangunan desa dalam aspek olahraga.

2. Manfaat Praktis

- a. Penambahan Pengetahuan: Penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru terkait pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap pembangunan fisik dalam bidang olahraga.
- b. Rujukan Referensi: Penelitian ini akan memberikan sumber referensi yang sangat berharga bagi mahasiswa-mahasiswi yang dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan penyusunan tugas, karya ilmiah, ataupun penelitian mereka sendiri.